

Indonesianisasi dan Ekonomi Off-Farm Pribumi
(Kajian Historis Perkembangan Industri Kerajinan Tenun Lokal di Yogyakarta
1930 -1960)

Oleh :
Hersumpana

“Sejarah bukan sesuatu yang sudah terjadi.
Yang terjadi paling hebat sebuah berita.
Sejarah adalah apa yang terjadi
Dalam hubungannya dengan tuntutan zaman”

J.H. Van der Berg
(Metableita, 1960)

A. Pendahuluan

Memaknai pengertian *Indonesianisasi* dalam konteks perubahan sosial masyarakat Indonesia dari mayoritas masyarakat yang agraris ke arah ekonomi non-pertanian dari sudut historis, khususnya dalam masa transisi dari pemerintahan kolonial menuju Indonesia merdeka, seakan-akan sedang menggapai-gapai ruang tanpa ujung dan sunyi. Bingkai-bingkai sejarah peradaban manusia modern yang menjadi ukuran dalam pergaulan intelektual selama ini hanya berlaku untuk komunitas masyarakat yang menyatakan diri sebagai pusat peradaban tinggi (kolonialis) dibandingkan dengan masyarakat bekas anak-anak jajahannya (*colonized*). Sebaliknya, dekolonialisme melahirkan perubahan-perubahan mendasar dalam pola berpikir dan bertindak masyarakat terjajah. Pencarian makna baru proses Indonesianisasi sebagai proses alami dan memiliki latar belakang sejarah panjang perubahan kehidupan masyarakat yang lebih manusiawi tidak lepas dari kerangka perubahan zaman tersebut.

Perubahan masyarakat secara ekonomis selalu mengikuti hukum evolusionis dan bukan sesuatu yang instan dan revolusioner. Pengertian indonesianisasi lebih banyak dimaknai sebagai proses nasionalisasi atau pengambilalihan secara paksa oleh pemerintah Indonesia atas property dan kekayaan milik perusahaan-perusahaan asing terutama Belanda. Gerakan nasionalisasi ini menimbulkan “sakit hati” terutama kelompok *the very big international corporations*¹ (seperti kelompok “the big five”) yang menguasai hajat ekonomi nasional Indonesia muda yang sangat menguntungkan. Pemerintah Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat mengambil kebijakan-kebijakan untuk membangun ekonomi nasional dari kelompok komunitas pribumi. Pembentukan identitas ekonomi ini merupakan suatu tuntutan zaman dari negeri yang berdaulat. Semangat zaman yang hendak dimunculkan adalah kemandirian dan kemajuan anak-anak negeri terlepas dari bayang-bayang dominasi ekonomi pengusaha asing.

Indonesianisasi dalam kajian literatur memiliki makna beragam. Indonesianisasi merupakan gerakan nasionalisme ekonomi Indonesia seperti juga muncul di negara-negara bekas kolonial di Asia Tenggara seperti Phillipina, Indonesia, Malaysia. Dalam arti tertentu, nasionalisme ekonomi sering lebih bersifat emosional daripada berdasarkan pertimbangan rasional, seperti yang terjadi di Indonesia pada sejak awal kemerdekaan dimaknai sebagai proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing ke tangan orang pribumi atau nasional. Kemerdekaan belum dianggap lengkap jika belum berdaulat secara ekonomi. Di kalangan pejuang muda awal kemerdekaan RI, mereka menginginkan kemerdekaan 100 persen, baik secara politik maupun ekonomi. Kelompok ini diwakili oleh Tan Malaka dan pengikut-pengikutnya seperti Chaerul Saleh, Sukarni yang punya pandangan radikal dibandingkan

¹ Meminjam istilahnya Mangunwijaya untuk menjelaskan perusahaan-perusahaan multi nasioanal seringkali lebih berkuasa daripada negara. Kelompok pengusaha raksasa ini mempunyai segalanya dan dapat menyetir kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah sesuai dengan kepentingannya. Lih. Y.B.Mangunwijaya, *Menuju Republik Indonesia Serikat*, Pt Gramedia, 1998.

kelompoknya Soekarno dan Muhammad Hatta yang dianggap sebagai kolaborator penindas (sic. Jepang).

Gerakan nasionalisme ekonomi di Indonesia lebih dikenal dengan istilah *Indonesianisasi*. Pengertian *Indonesianisasi* banyak difasilitasi oleh karya John O'Sutter, seorang mantan diplomat kedutaan Amerika di Jakarta, yang kemudian belajar di Cornell. Dalam tesisnya, Sutter mendefinisikan *Indonesianisasi* sebagai “ *a conscious effort to increase the participation and elevate the role Indonesian and more particularly the 'indigenous' Indonesian in the more complex sectors of the economy*”². *Indonesianisasi* merupakan satu usaha secara sadar untuk menguasai sektor ekonomi nasional ke tangan penduduk pribumi. Pengertian pribumi ini menunjuk pada etnik asli Indonesia seperti Batak, Dayak, Bugis, Jawa, Sunda, Minangkabau, Madura dan keturunan Eropa, Arab, India dan Cina yang lahir di Indonesia. Meski pada kenyataannya ada sentimen yang kuat untuk membedakan kelompok Cina dan pribumi. Golongan Cina lebih dianggap sebagai pesaing daripada bagian dari komunitas pribumi meski mereka telah lahir di Indonesia. Jika ditilik dari sejarah gerakan nasionalisme ekonomi itu berkembang setelah perang dunia kedua, khususnya kebijakan untuk mengontrol hubungan ekonomi eksternal dan kedaulatan ekonomi. Kemudian pengertiannya diperluas menjadi suatu integrasi terencana dari kebijakan berbeda untuk mengejar tujuan perkembangan ekonomi ke arah modernisasi³. Bagi negara-negara bekas kolonial seperti Indonesia berarti mengarah kebijakan kemandirian ekonomi yang dijalankan oleh golongan pribumi. *Pribumisasi (indeginism)* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan struktur kebijakan dan lembaga yang diciptakan untuk

² John O'Sutter, *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy 1940–1955*, South East Asia Program Departement of Far Eastern Studies, Cornell University, Ithaca, NY, 1959, hal. 2

³ Modernisasi membutuhkan perubahan ekonomi dan masyarakat negara-negara berkembang setelah ditinggalkan oleh kolonial. Di bawah kolonial ekonomi di negara-negara berkembang dikembangkan kebijakan “*colonial laissez faire*” yang menawarkan jaminan percepatan pertumbuhan ekonomi atau industrialisasi lewat investasi-investasi perusahaan swasta asing.

merubah dimensi rasial dari sistem ekonomi kolonial yang diwarisi oleh masyarakat Asia Tenggara.⁴

Pribumisasi merupakan istilah yang dipakai Ralph Anspach⁵ dalam disertasi doktoralnya, dalam konteks ini digunakan untuk menunjukkan sebuah proses kontrol atas kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang didistribusikan kepada anggota masyarakat nasional sebagai indentas ekonomi nasional suatu bangsa. Dalam arti tertentu, indeginisasi memiliki konotasi makna seperti proses *Indonesianisasi* kegiatan-kegiatan ekonomi di Indonesia awal kemerdekaan untuk mendapatkan kekuasaan atas sumber-sumber ekonomi nasional.

Kajian tentang *Indonesianisasi* yang terbaru dilakukan oleh Thomas Linblad dalam makalahnya "*The Importance of Indonesianisasi During The Transition From The 1930s to The 1960s*"⁶. Linblad dalam kajiannya mencoba meletakkan pengertian *Indonesianisasi* dalam konteks kebijakan politik Indonesia terutama setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada bulan Desember 1949 dan secara khusus mengkaji *Indonesianisasi* dan pengaruhnya terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia diambilalih (*nasionalisasi*). Menurut Lindblad sampai sekarang masih terjadi kesimpangsiuran berkaitan dengan proses nasionalisasi sehingga perlu penelitian lebih jauh dari berbagai sudut pandang. Bagi Linblad sendiri *Indonesianisasi* yang dijalankan oleh pemerintah Soekarno bersifat instan dengan berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi yang bersifat diskriminatif terhadap keberadaan perusahaan asing terutama Belanda dan kelompok Cina. Satu contoh, pada awalnya proses *Indonesianisasi* terhadap *De Javasche Bank* berjalan dengan damai lewat pergambilalihan manajemen bank ke tangan Indonesia, karena pemerintah baru Indonesia membutuhkan Bank Sentral. Ketentuan

⁴ Frank H Golay et al., *Underdevelopment and Economic Nationalism in Southeast Asia*, Cornell Univ. Press, Ithaca and London, 1968, hal. 9

⁵ *Ibid.*

⁶ Makalah dipersiapkan untuk konferensi *on Economic Growth and Institutional Change in Indonesia in the 19th and 20th Centuries*, Amsterdam, 25-26 February 2002.

pelaksanaan nasionalisasi *De Javasche Bank* Diatur dalam Undang-Undang no. 24 tahun 1951 tanggal 6 Desember 1951. Pemerintah Indonesia memberikan ganti rugi terhadap saham yang dimiliki warga negara Belanda sebesar 120 persen dari harga nominal dalam mata uang Belanda. Sedang terhadap warga negara Indonesia diberi ganti rupa sebesar 360 persen dari harga nominal mata uang Indonesia. Nasionalisasi *De Javasche Bank* dilakukan menteri keuangan Jusuf Wibisono dibawah kabinet Perdana Menteri Dr Soekiman Wirjosandjojo melalui serangkaian pengumuman terbuka lewat pers dan dengar pendapat dengan DPR(S)⁷. Masa itu secara ekonomi, Indonesia masih sangat tergantung dengan perusahaan-perusahaan besar asing terutama Belanda yang masih menguasai berbagai perusahaan utama. Yang paling sulit diterima oleh pihak belanda adalah proses pengambilalihan secara paksa atas perusahaan-perusahaan Belanda, dan pengusiran ribuan warga Belanda di Indonesia dalam waktu yang singkat kembali ke negerinya setelah kebijakan nasionalisasi dilaksanakan tahun 1957.

Lindblad dari kajian tentang *Indonesianisasi* itu mengambil beberapa kesimpulan bahwa proses tersebut terjadi secara gradual dalam masa transisi dari kolonial ke pemerintah Indonesia sebagai berikut; 1) Akar sejarah dapat ditemukan dalam contoh-contoh *entreprenuership* pribumi semenjak periode akhir kolonial yang terus berjalan patut diperhatikan. 2) Kebijakan Benteng antara tahun 1950-1957 merupakan *Indonesianisasi* yang dipaksakan oleh pemerintah dan mengakibatkan gagalnya tumbuhnya investasi kapital asing (Belanda). 3) *Indonesianisasi* bersamaan dengan industrialisasi pada zaman tahun-tahun awal pemerintahan Sukarno mendapatkan momentum kembali meski dalam ruang yang masih terbatas. 4) Tingkat *Indonesianisasi* yang penting

⁷ *Focus Kita* tentang Nasionalisasi, Mei 2004.

adalah pengakuan atas identitas etnik yang menyatu dalam perdagangan dan manufaktur dalam usaha-usaha baru yang dibentuk⁸.

Pertanyaan muncul bagaimana dalam rentang sejarah Indonesia suatu proses perkembangan dan perubahan sosial masyarakat ke arah modernitas yang lebih natural mengikuti alur perjalanan sejarah yang panjang muncul dari tuntutan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia sesuai dengan tingkat peradaban dan kebudayaan yang berkembang. Penelitian ini menggambarkan salah satu sektor dasar perkembangan industri lokal off-farm yakni industri tenun lokal di wilayah Yogyakarta kurun waktu 1930 - 1960-an dalam kerangka pemaknaan indonesianisasi dan respon masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah dalam mengembangkan sektor ekonomi pribumi. Secara khusus, dari kasus perkembangan industri tenun lokal Yogyakarta menggali tentang asal-usul berkembangnya Industri tenun, jaringan pemasaran, organisasi yang mengurus tekstil dan kemunduran industri tenun menjelang akhir pemerintahan Sukarno.

B. Awal Industrialisasi Pedesaan di Yogyakarta

Industrialisasi muncul sejak masuknya investasi kapital untuk pengembangan industri-industri perkebunan di Jawa pada paruh pertengahan abad 19. Esensi penguasaan kolonial itu bersifat pengerukan keuntungan ekonomis. Istilah yang muncul adalah *resources drain* atau diangkutnya sumber-sumber kekayaan wilayah jajahan keluar ke negeri penjajah. Peter Boomgard dalam Bukunya Anak Jajahan Belanda Sejarah Sosial Ekonomi Jawa 1795-1880, memberikan gambaran detail tentang sejarah sosial ekonomi Jawa terkait dengan perkembangan ekonomi Jawa abad 19 yang dipandang kurang memadai. Perkembangan industrialisasi tanaman perdagangan merupakan upaya dari kebijakan pemerintah kolonial untuk meningkatkan pendapatan karena VOC

⁸Thomas Linblad, *The Importance of Indonesianisasi During The Transition From The 1930s to The 1960s*, Amsterdam, 2002, hal 22.

merugi. Terbukti setelah muncul kebijakan dari Gubernur Jendral Van den Bosch untuk melakukan sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) mampu memberikan surplus luar biasa bagi pemerintah kolonial dan membawa kemakmuran warga Belanda dan Eropa di Hindia Belanda. Bersamaan dengan perkembangan liberalisasi ekonomi, terjadi juga perubahan-perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dan sosial di Jawa. Penduduk banyak melakukan kegiatan kegitan diluar pertanian (*off-farm*) sebagai penghasilan tambahan, mulai berkembang alat tukar untuk kepentingan pasar dan terjadinya hubungan yang semakin luas antar masyarakat di pedesaan⁹. Perusahaan Belanda banyak memberikan pengaruh besar dalam perubahan masyarakat terutama dalam diversifikasi pekerjaan.

Kajian Boomgaard menampilkan kemungkinan-kemungkinan bahwa pertumbuhan ekonomi pedesaan Jawa seiring dengan perkembangan kebijakan kolonial juga mengalami kemajuan-kemajuan dibidang non-pertanian. Setelah periode 1870, ketika terjadi perubahan kebijakan tentang pertanahan, dimana dimungkinkan adanya sewa jangka panjang bagi pengusaha swasta belanda sampai 75 tahun (Undang-Undang Agraria 9 April 1870 S 50 dan Dekrit Agraria KB 20 Juli 1870 S118)¹⁰. Banyak pengusaha-pengusaha asing menanamkan kapitalnya di Hindia Belanda.

Pada pedalaman Jawa, terutama di daerah Yogyakarta dan Surakarta, perkembangan itu semakin pesat setelah dibangun sarana transportasi yang dibangun oleh perusahaan Belanda bernama *Netherlandsch Inlandsche Spoorweg (NIS)* untuk mengangkut hasil-hasil gula sampai ke pelabuhan di Semarang pada tahun 1872. Dengan dibangunnya jalur kereta api di wilayah *Vorstenlanden* ini memberikan keuntungan 2,6 juta gulden dan dalam waktu lima tahun jumlah pengiriman barang meningkat sampai 270 persen. Setelah ada penambahan jalur

⁹ Lih. The Kian Wie, Kata Pengantar untuk Edisi Indonesia buku *Anak Jajahan Belanda Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*, Terbitan KITLV dan PT. Djambatan, Jakarta, 2004, xvi –xvii.

¹⁰ Peter Boomgard, *Anak Jajahan Belanda Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*, Jakarta: KITLV dan PT Djambatan, 2004, hal. 64.

kereta api di dalam wilayah *Vorstenlanden*, seperti jalur Yogyakarta-Brosot, Yogyakarta-Magelang-Parakan, dan Jalur Trem Surakarta -Boyolali menjadikan *Vorstenlanden* sebagai pusat perdagangan utama¹¹. Menjelang awal abad ke-20 gula telah menjadi salah satu industri terpenting di Yogyakarta, dengan produksi tahunan sekitar 230.000 ton, atau sekitar 8 % dari seluruh produksi di Jawa¹².

Faktor pendorong perkembangan industri gula di wilayah Yogyakarta berkaitan dengan kepemilikan tanah yang khas kesultanan. Seluruh tanah kecuali tanah *lungguh* tanah yang diberikan kepada pejabat desa sebagai ganti upah adalah milik penguasa, Sultan. Petani hanya memiliki hak gaduh (hak tetap untuk memanfaatkan tanah) tetapi bukan hak kepemilikan (*eigendom*). Sistem pertanahan di Yogyakarta ini diberikan sebuah landasan legal yuridis lewat sebuah dekrit, yaitu *Rijkblad* Yogyakarta no. 16 tahun 1918. Melalui dekrit ini, petani lelaki, dengan persyaratan tertentu (kuli kenceng) diberi dua petak yang disebut *glebag* masing-masing sekitar 2500 meter persegi¹³. Salah satu dari dua *glebag* itu harus disewakan kepada pihak perkebunan gula, sementara satunya lagi dimanfaatkan oleh petani untuk ditanami padi. Masing-masing *glebag* dipertukarkan setiap satu setengah tahun. Melalui sistem pengaturan seperti ini, ada jaminan bagi perkebunan gula untuk memiliki akses atas wilayah tanah tertentu setiap tahunnya. Pada tahun 1920-an, luas tanah kesultanan yang dipakai untuk penanaman tebu di Yogyakarta pada tahun ganjil dan genap mencapai 34.000 ha, luas tersebut merupakan 80% dari seluruh persawahan di Yogyakarta. Pihak perkebunan hanya melakukan kontrak dengan Sultan, dan tidak perlu melakukan perundingan dengan petani. Uang sewa diserahkan kepada Sultan, dan bukan kepada petani. Pada tahun 1926, harga sewa

¹¹ Takhasi Siraishi, *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912 –1926*, Jakarta: Grafiti Press, 1997, hal 10-11 bdk *Koloniale Verslag, 1876,1881, 1896*.

¹² Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: Grasindo, 1993, hal . 43.

¹³Satu *glebag* kurang lebih sama dengan istilah yang digunakan penduduk di wilayah Sleman *sakbagian*.

mencapai F. 1.927.000, yang merupakan 28% dari seluruh penerimaan pemerintah Sultan¹⁴.

Fondasi ekonomi kolonial yang mengandalkan ekspor hasil tanaman produktif hancur ketika terjadi krisis ekonomi dunia, tahun 1929 -1930. Terjadi gelombang pemulangan buruh-buruh perkebunan ke kampung halaman dan banyak memunculkan pengangguran. Pada masa-masa krisis inilah kemudian muncul kebijakan untuk mengembangkan industri-industri di luar eksploitasi tanaman produktif. Banyak penduduk kembali menekuni kegiatan-kegiatan kerajinan sebagai penopang kegiatan ekonomi subsistensinya. Di beberapa daerah seperti Yogyakarta ternyata industri rakyat perak di Kota Gede merupakan satu-satunya sektor ekonomi yang paling tidak terpengaruh oleh krisis seperti yang diungkap oleh O'Malley¹⁵. Industri tenun lokal Stagen dan Lurik berkembang pesat di daerah Nanggulan dan Kenteng Kulon Progo. Sebuah majalah ekonomi Kepatihan Yogyakarta melaporkan antara tahun 1930-1940 pengrajin tenun rumah tangga , lurik dan stagen, mengalami kejayaan terutama setelah tahun 1933 ada gerakan swadesi yang dipelopori oleh Dr. Sutomo. Penjualan lurik dan terutama stagen digambarkan seperti air bah ke kota-kota di Jawa Timur¹⁶.

Di sektor industri tenun kemudian pemerintah kolonial punya inisiatif untuk mengembangkan industri kerajinan tenun rakyat dengan mengembangkan alat tenun mesin di ITB pada tahun 1937. Secara makro pemerintah juga membuka bank-bank kredit usaha Kecil sampai di tingkat desa untuk merangsang usaha rakyat. Dalam waktu singkat terjadi lonjakan usaha tenun. Ini bisa dilihat dari pekermbangan jumlah mesin tenun yang ada. Tercatat pada tahun 1930 baru terdapat 500 buah ATBM (alat tenun bukan Mesin) dan 40 ATM (alat Tenun Mesin). Dalam lima tahun berikutnya menjadi 4000 buah

¹⁴ Aiko Kurasawa, hal. 44 *bdk* Selo Sumardjan, *Perubahan Sosial Di Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, 1981.

¹⁵ William Joseph O'Malley, *Indonesia in the Great Depression. A Study of East Sumatra and Yogyakarta in the 1930's*, Cornell Univ. NY, 1977 ditulis kembali oleh Nirwono dalam Prisma 8, Agustus 1983.

¹⁶ Majalah Ekonomi Kepatihan Yogyakarta no. 9 tahun ke IV , April 1951.

ATBM dan 400 ATM. Pada tahun 1940, alat tenun telah bertambah menjadi 35.000 ATBM dan 6.600ATM¹⁷. Ingrid Palmer dan Lance Castle menampilkan data yang cukup detail perkembangan jumlah mesin tenun ATBM dan ATM dari Tahun 1930 -1960 untuk menggambarkan bahwa industri tenun sangat banyak karena mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Tabel 1. list mesin mesin tenun pada tahun tertentu dari 1930 -1969

Tahun	ATBM	ATM
1930	257	44
1935	3.915	414
1940	44.000	8.000
1950	71.997	11.390
1955	78.857	12.697
1957	111.522	15.301
1960	150.000	16.896
1962	223.905	22.171
1967	n.a	26.537
1969	280,000	27.000

Sumber : Hasil olahan Ingrid Palmer and Lance Castle, "The Tekstil Industry" dalam Bruce Glassburner (eds) *The Economy of Indonesia, Selected Readings*, hal 319.

Kemajuan itu cukup luar biasa, setelah ada perhatian untuk pengembangan sektor industri kerajinan tenun rakyat. Kegiatan industri rakyat mulai dikembangkan karena setelah krisis ekonomi tahun 1929 kegiatan produksi di perkebunan menurun tajam. Mekanisme kegiatan subsistensi di desa-desa secara alami mampu menyelamatkan situasi krisis tersebut. Rakyat secara kreatif menciptakan peluang-peluang usaha di bidang kerajinan untuk bisa survival. Menurut penuturan Pak Adimulyo¹⁸ dan istrinya, mereka belajar tenun sejak jaman kolonial. Dulu mereka menjadi buruh pabrik tenun di daerah Kota baru, Yogyakarta. Sekitar Tahun 1930-an, di desa-desa wilayah Moyudan, masyarakat menggunakan tenun *gendong* untuk menghasilkan bahan pakaian

¹⁷ Soeri Suroto, Sejarah kerajinan di Indonesia, Prisma 8, Agustus 1983.

¹⁸ Pemilik industri Tenun rakyat di Desa Gamplong Moyudan, wawancara tgl 12 Juni 2004.

seperti sarung, *jarit (sinjang)* atau kain kebaya untuk pakaian perempuan, beskap, dan selendang. Hampir setiap rumah mempunyai alat tenun *gendong*.

Menjelang tahun 1940, kehidupan ekonomi di Hindia Belanda semakin baik ditandai dengan ramainya iklan-iklan di Surat Kabar yang menawarkan produknya salah satunya sebagai contoh adalah iklan yang dibuat oleh Kiem Bie¹⁹ yang menawarkan kain untuk pakaian gaya Eropa. Pakaian gaya Eropa masih sangat terbatas dikalangan elite. Sementara kebanyakan masyarakat masih menggunakan pakaian tradisional.

C. Masa Jepang dan Revolusi (1942-1949):

Memikul Penderitaan dan Meneguhkan Inisiatif

Pada masa penjajahan jepang kehidupan ekonomi rakyat sangat menderita, rakyat banyak dijadikan tenaga paksa untuk mendukung kepentingan perang jepang melawan sekutu. Semua kegiatan ekonomi banyak diarahkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan dalam rangka perang. Seperti kegiatan penanaman jarak, penanam padi, kapas dan pembuatan proyek-proyek untuk lapangan terbang bagi kepentingan Militer Jepang. Rakyat banyak dimobilisasi untuk kepentingan pemerintahan jepang. Karena kerasnya kebijakan pemerintah militer Jepang rakyat mengalami kekurangan pangan dan sandang. Aiko Kurasawa dalam bukunya *Mobilisasi dan Kontrol* mendapatkan data-data menarik dari penelitiannya di wilayah pedesaan Yogyakarta kaitannya dengan munculnya industri kecil kerajinan tenun rakyat di desa Sumber Sari dan Tumut, kecamatan Moyudan, di bawah Kawedanan Godean, Yogyakarta.

Pada tahun 1920 - 1940, daerah Moyudan merupakan daerah industri perkebunan gula. Sebagian sawah untuk pertanian disewakan kepada pihak perkebunan tebu. Di wilayah tersebut terdapat pabrik tebu Padokan yang membawahi wilayah moyudan. Wilayah moyudan merupakan daerah pertanian yang subur karena mendapatkan irigasi yang dialirkan dari sungai Progo yang

¹⁹ Diambil dari Kilas Balik PPII cf. *Economic Weekblad*, 8 February 1939.

dibangun pada tahun 1914, saluran tersebut dikenal dengan saluran irigasi *Van der Wijck* yang masih berfungsi baik sampai sekarang.

Ketika Jepang masuk kehidupan petani menjadi semakin sengsara karena adanya mobilisasi masa untuk membangun konstruksi-konstruksi untuk kepentingan militer Jepang. Di Yogyakarta ada proyek pembangunan konstruksi besar seperti pembangunan kanal irigasi yang menghubungkan kali progo dengan kali Opak, yang dikenal dengan sebutan *Kanal Yoshiro*²⁰. Banyak masyarakat juga dijadikan tenaga sukarela (*romusha*) yang dikirim sampai keluar Jawa dalam waktu yang lama. Selain itu masyarakat masih harus dibebani dengan kewajiban untuk menyeter beras kepada pemerintah militer. Karena semakin menyempit lahan dan tekanan pemerintah, masyarakat banyak yang keluar daerah untuk menghindari kerja rodi tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aiko Kurawa menunjukkan bahwa keadaan tersebut mendorong penduduk untuk mencari sumber lain bagi kelangsungan hidupnya, beberapa yang lain meninggalkan desanya, dan yang lain mencari penghasilan tidak tetap dengan membuat produk tertentu untuk mereka jual sendiri seperti kerajinan bambu. Ketika barang kehidupan sehari-hari sulit didapat banyak yang menjadi pedangan dengan menjual barang untuk mencari untung. Fenomena ini banyak ditemui pada masa itu, dalam istilah Geertz mereka ini disebut sebagai *peddlers* atau penjaja keliling.

Salah satu gagasan baru yang ditemukan oleh petani daerah Sumpasari adalah industri tenun. Karena begitu langkanya bahan sandang, banyak penduduk memakai pakaian terbuat dari goni dan karet. Oleh karena itu, industri tenun bisa menguntungkan jika orang dapat memperoleh bahan katun yang cukup. Namun, di Yogyakarta, penanaman kapas tidak berhasil. Kemudian beberapa petani kaya daerah Tumut desa Sumpasari berpikir untuk

²⁰ Kanal *Yoshiro* sekarang dikenal dengan sebagai Selokan Mataram. Meskipun demikian beberapa penduduk percaya bahwa kerja untuk pembuatan kanal itu merupakan hasil dari negosiasi sultan dan jepang sehingga banyak penduduk Yogya tidak dikirim sebagai *romusha*. Mereka merasa beruntung dari pada yang dikirim sebagai *romusha*.

menyelundupkan benang katun dari wilayah Surakarta. Mereka yang memiliki modal secara diam-diam melintasi wilayah perbatasan dan pergi ke sebuah pasar di Pedan yang merupakan pusat pengumpulan benang katun. Mereka membeli benang dalam jumlah besar dan menyewa beberapa orang wanita di pasar tersebut untuk membawanya, sedikit demi sedikit, dibalik kain mereka. Upaya menyelundupkan bahan katun tersebut selalu berhasil melewati penjagaan, kemudian mereka memperkerjakan tetangga-tetangganya yang miskin untuk menenun bahan tersebut. Hasilnya kemudian dijual di pasar Godean dengan harga lumayan. Aiko tidak mendapatkan data yang jelas tentang berapa pegawainya dan berapa hasil tenunannya. Namun demikian usaha itu cukup berkembang.

Di samping bertani, pada jaman Jepang pemintalan dan tenun kapas juga didorong di pedesaan. Kursus-kursus latihan pemintalan diselenggarakan di berbagai tingkat pemerintahan. Misalnya, di Kabupaten Indramayu, dua wakil *fujinkai* dari setiap kecamatan dikirim ke ibukota kabupaten dan dilatih selama tiga bulan pada tahun 1944. Latihan tersebut disponsori oleh Hokokai dan Fujinkai cabang kabupaten, dipimpin oleh istri bupati. Peserta ditempatkan di sebuah asrama di dekat kantor kabupaten. Mereka mempelajari teknik pemisahan kapas (mengambil kapas mentah dari bijinya) dan memintalnya menjadi serat kapas. Setelah pulang dari latihan giliran mereka menyelenggarakan kursus latihan serupa di tingkat kecamatan dan melatih wakil-wakil dari setiap desa. Alat yang diperlukan untuk memisahkan serta memintal kapas disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan latihan. Biaya latihan, termasuk untuk makanan dan penginapan peserta, ditanggung oleh Hokokai. Di Kabupaten gunung kidul (Yogyakarta) beberapa sekolah pemintalan yang permanen dibangun di tempat-tempat seperti Wonosari dan Semanu. Melalui pelatihan-pelatihan ini teknik pemintalan merasuk ke dalam masyarakat desa, dan akhirnya banyak keluarga sibuk dengan bisnis ini. Dengan serat kapas yang dihasilkan keluarga petani mulai menenun dengan

menghidupkan kembali alat-alat tenun tradisional. Pada masa sebelum perang tahun 1941, alat tenun tangan untuk tujuan industri sebanyak 49.000 di seluruh Jawa, dan sekitar 34 % terpusat di Priangan. Berkat dorongan Jepang tenun sebagai industri rumah berkembang di daerah lain di Jawa²¹.

Pada waktu itu, menurut seorang informan dari Indramayu, harga satu helai kain sarung dapat ditukarkan dengan 4 kwintal beras dipasar gelap. Satu kain sarung bisa memakan 4 hari untuk mengerjakannya dan membutuhkan sekitar 300 gram kapas mentah. Diberitakan bahwa langkanya kain pada jaman itu, sehingga di beberapa daerah bahan sandang menjadi alat tukar²². Berkembangnya tenun sebagai industri rumah tangga, kelangkaan bahan sandang dalam jumlah tertentu dapat diatasi pada tahun 1944. Pengalaman memintal dan menenun di kalangan penduduk desa itu dihidupkan lagi dibawah pemerintahan Sukarno, sewaktu ada gerakan “Berdiri atas Kaki Sendiri” (Berdikari), dengan memanfaatkan mesin tangan (ATBM).

Pada zaman Revolusi ekonomi secara makro mengalami kemandegan, ekonomi subsitensi untuk survival masyarakat tetap berjalan seperti perdagangan di pasar-pasar tradisional dan perdagangan keliling menjajakan barang-barang kebutuhan sehari-hari dan berbagai macam kerajinan yang hidup di tengah masyarakat. Secara ekonomi pemerintahan Indonesia belum menemukan bentuknya, hampir semua masih berada di tangan-tangan asing. Baru setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada bulan Desember 1949 dengan syarat dijaminnya asset-asset milik perusahaan Belanda di Indonesia, pemerintah mulai melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan kemandirian ekonomi Bangsa terutama kaum pribumi, yang paling kentara diberlakukannya ekonomi *Benteng*, pembentukan panitia Industrialisasi dan pemberian lisensi khusus bagi importir pribumi sebagai pelaku ekonomi dalam

²¹ Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan kontrol....*, hal. 32.

²² Aiko Kurasawa, *Ibid.*

rangka proses pemberian peran dan pengembangan pengusaha-pengusaha pribumi.

D. Industrialisasi Tenun Moyudan (1950 -1967)

Studi kasus industri pedesaan ini mengambil fokus wilayah Kecamatan Moyudan, terutama desa Sumberrahayu dan Sumbersari. Desa Sumber sari memiliki sejarah tersendiri dalam pengembangan industri tenun sejak jaman Jepang seperti yang diungkapkan oleh Aiko Kurasawa, sedang Desa Sumber rahayu lebih belakangan muncul sebagai wilayah yang banyak mengembangkan industri tenun pada masa-masa pemerintahan Soekarno mendukung kebijakan Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri). Sebagai perbandingan ditelusuri juga wilayah-wilayah sekitar yang saling berbatasan seperti wilayah Minggir dan Kulon Progo. Dalam catatan perkembangan tenun daerah Kulon progo lebih awal maju dan mencapai kejayaan pada tahun 1930 -1940²³.

1. Masa pembelajaran -sampai munculnya

Pak Ahmadi²⁴, warga Gamplong Moyudan, mengalami masa-masa sulit ketika itu. Ia lahir sekitar tahun 1926. Tahun-tahun itu kehidupan begitu sulit, bahkan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia bisa mengenyam pendidikan SR dan lulus tahun 1938. Masa itu banyak warga Gamplong harus pergi ke luar desa untuk bekerja di kota agar bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Ia mengikuti jejak teman-temannya dan mulai belajar menenun di Kota Yogyakarta, tepatnya di Kota baru, pada sebuah pabrik tenun ATBM milik seorang Cina, Tan Tjoe Swan. Awalnya ia menjadi tenaga tanpa bayaran seperti magang, hanya belajar sampai mendapatkan Gaji. Pekerjaan menjadi buruh tenun pada waktu itu hasilnya sangat baik, jika dihitung dibandingkan gaji Guru lebih baik buruh tenun. Gaji guru waktu itu hanya 7,5

²³ lih. Majalah Ekonomi th. IV No. 11 & 12, Nop- Des 1951 hal 13-15.

²⁴ Pak Ahmadi pernah menjadi sekretaris koperasi Dwi djaja pada masa-masa awal pembentukan tahun 1962 lalu mengundurkan diri dan digantikan oleh Pak Zainudin.

rupiah sebulan tahun 1930-an. Menjadi buruh tenun bisa lebih besar karena dihitung berdasarkan perolehan. Sehari bisa menenun sebuah sarung. Upah menenun satu hari jika dibelikan beras adalah bisa mendapat 1 kg lebih. Kurang lebih buruh tenun sehari mendapatkan 7,5 rupiah, jika harga beras 1 kg waktu itu 5 rupiah. Ada banyak temannya yang bekerja di pabrik itu dari gamplong seperti pak Ardjo Uwuh (Paimin), Pak Arja Tulus.

Pada jaman Jepang pabrik tutup, mereka pada kembali ke kampung. Namun Jepang membuat suatu pelatihan tenun sampai ke desa-desa, bahkan mendapatkan sertifikat. Tahun 1951, tenun mulai berkembang di Yogyakarta. Pak Ahmadi kemudian bekerja pada satu perusahaan tenun di Kauman. Salah seorang mandornya adalah Pak Ardja Uwuh²⁵ tetangganya. Pak Ardjo uwuh dikenal sangat pintar. Teman-temannya menyebutnya sebagai Insiyur sungguhan, terutama dalam membuat pola dan mesin tenun. Pak Arja ini kemudian sering mendapatkan order dari pemilik modal untuk membuka usaha tenun. Keahliannya bisa diandalkan. Selain, bekerja di kauman, banyak warga Moyudan yang bekerja di industri-industri tenun di daerah cungkuk, gampingan dan daerah Pengkol²⁶, klajuran Godean. Sebagai perbandingan, pengalaman masyarakat Nanggulan Kulon Progo, wilayah yang bersebelahan dengan Moyudan yang dipisahkan oleh aliran sungai Progo, juga mendapatkan kemampuan bertenun dengan bekerja di pabrik tenun besar. Di Nanggulan ada satu pabrik tenun milik seorang Belanda, bernama Amungkrida. Ketika nasionalisasi pabrik ini dibakar masa, dan pemiliknya diusir. Menurut penuturan ibu Sabar²⁷, seorang pemilik usaha tenun “Dadi Sabar” di Nanggulan, para pemilik usaha tenun dan pekerja tenun waktu itu punya pengalaman yang

²⁵ Pak Ardja Uwuh lahir di Gamplong Moyudan, besar di Kota Yogyakarta, belajar tenun di Solo, Yogya dan Magelang.

²⁶ Daerah Pengkol (klajuran) waktu itu sangat terkenal dengan hasil tenun lurik, salah satu pengusaha lurik terkenal bernama Pak Kusni. Pak Kusni menurut penuturan pak Poerwa bahkan punya kemampuan berbahasa Belanda sangat baik.

²⁷ Salah satu pengusaha tenun ATBM yang masih bertahan, sekarang masih aktif menjalankan usahanya dengan 15 mesin ATBM membuat kain sarung pantai, handuk, kain pel dan tenunan kreasi souvenir untuk turis.

baik karena bekerja di pabrik tenun Amungkrida. Pada saat Jaya ibu Sabar sampai mempunyai 200 mesin tenun.

Sekitar tahun 1953-1956, masyarakat mulai mencoba membuat alat sendiri dan mengambil order dari pengusaha-pengusaha tenun tempat mereka bekerja. . Karena hasilnya waktu sangat baik, banyak orang lalu mencoba membuat mesin tenun ATBM sendiri, beberapa ada yang membeli dari luar daerah seperti Pedan, Klaten. Perkembangan industri tenun Moyudan makin pesat ketika ada jatah benang dari pemerintah melalui Koptexi (Koperasi Tekstil Indonesia) yang dikoordinasi oleh departemen perindustrian.

2. Terbentuknya Jaringan Pemasaran Produk

Produk industri tenun Moyudan waktu itu adalah stagen, serbet, kain blacu dan perban. Sebagian besar dari pemilik industri tenun wilayah Moyudan mempunyai latar belakang pedagang. Sebelumnya, mereka adalah pedagang pasar atau buruh tenun di perusahaan besar di kota. Mereka telah memiliki jaringan informal yang efektif dari teman-teman pedagang pasar. Seperti Ibu Dirja Suwoto (istri mantan Lurah Moyudan), juga ikut membuat usaha tenun. Ibu Dirja memiliki 16 mesin tenun. Produk tenunannya adalah stagen dan serbet. Untuk pemasaran, ibu Dirja sudah punya jaringan sendiri. Sebelum membuka industri tenun, Bu Dirja adalah pedagang *Lawe* (bahan utama tenun) yang menyeteri benang di sekitar Moyudan. Lewat teman-teman dagangnya dari Jember, ada yang dari pekalongan, Kebumen dan Purworejo mengambil hasil tenunannya. Jika dirata-rata produksinya setiap bulan bisa mencapai sekitar 60 sampai 70 kodi. Sampai sekarang Ibu Dirja masih menjalankan bisnis tenun dengan berdasarkan pesanan, terutama serbet dan handuk.

Pemilik usaha tenun ATMB lain, ibu Adimulyo juga mempunyai pengalaman sebagai seorang bekas pedagang dan buruh tenun. Usahanya cukup maju, ibu Adimulyo dibantu suaminya pada masa jayanya mempunyai 50 mesin tenun. Produk utama dari tenunannya adalah stagen. Produksinya sehari

bisa mencapai 5 kodi²⁸. Tenunannya banyak dijual dipasar lokal, seperti pasar Ngijon, pasar Godean, Pasar Beringharjo di Kota, dan Klewer di Surakarta. Selain itu, kadang juga mengirimkan hasil produksinya ke Pekalongan dan Sumatra.

Di antara para pengusaha tenun di Wilayah Yogyakarta, mereka juga memiliki jaringan pemasaran tersendiri. Jaringan pemasaran itu sudah terbentuk lama sebelum mereka menekuni industri tenun berkat pengalaman berdagang. Seperti yang diungkapkan oleh Christine Dobbin, bahwa para pedagang Jawa, terutama Yogyakarta dan Surakarta telah memiliki jaringan tersendiri terutama dalam memasarkan produk-produk kain, khususnya batik. Mereka telah mampu berhubungan langsung dengan orang-orang Eropa atau Cina. Jaringan perdagangan ini sudah terbentuk semenjak akhir abad 19 dan awal abad 20. Sementara yang paling mampu bersaing sebagai pedagang eceran dan bisa bersaing dengan kelompok Eropa dan Cina adalah pedagang dari Bawean madura, mereka mampu membangun jaringan sampai ke pedalaman terutama di daerah Jawa timur seperti Surabaya, Gresik, Kediri dan Madiun sampai di daerah Kedu, Banyumas²⁹.

3. Organisasi Tenun Moyudan di bawah Koperasi Primer Dwijaya.

Industri tenun lokal di Yogyakarta mengalami kemajuan cukup menggembirakan tahun 1958-1964 terutama setelah ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan bantuan jatah benang bagi pemilik tenun yang mempunyai lisensi dari department perindustrian. Bantuan ini diorganisir oleh koperasi tekstil. Di Yogyakarta awalnya dibentuk koperasi Trijaya pada tahun 1958. Pesatnya perkembangan industri tenun di wilayah Yogyakarta, terlebih di wilayah pedesaan kemudian Koperasi Trijaya dikembangkan menjadi koperasi

²⁸ Kodi merupakan ukuran volume yang dipakai menunjukkan banyaknya produksi. Satu kodi isinya 20 buah stagen. Satu buah stagen panjangnya sekitar 6 meter. Jika memiliki mesin 50 dengan hari efektif kerja 20 kali sebulan maka dalam satu bulan bisa menghasilkan 100 – 150 kodi.

²⁹ Christine Dobbin, *The Important of Minority Characteristics in the Formation of Bussiness Elites on Java: The Baweane Business Example, c. 1870 –c.1940*, Archipel no 41, Paris hal. 118 –121.

primer yang ada di wilayah-wilayah sentra industri tenun. Koperasi Trijaya berubah menjadi Pusat Koperasi Koptexi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama “Bhineka Tunggal Djaja” yang berkantor di Jl. Mangkubumi Gt I Gowongan, sebelah utara stasiun Tugu. Koperasi Bhineka Tunggal Djaja berkembang dari 5 koperasi primer pada tahun 1962 menjadi sepuluh kelompok koperasi primer tahun 1965. Koperasi Dwidjaja adalah koperasi tekstil tenun ATBM di Sumber Rahayu Moyudan, Sleman.

Koperasi Dwijaya mempunyai tugas mengurus dan mendistribusikan bantuan dari pemerintah berupa jatah benang yang pada waktu itu dikenal dengan benang *werkorder*, pewarna dan alat tenun. Koperasi melalui departemen perindustrian diberikan hak untuk melakukan mengimpor benang dari luar negeri. Jatah benang dari pemerintah tidak gratis, para pemilik tenun yang mendapat lisensi dari pemerintah mendapat jatah benang dengan harga 1/3 lebih rendah dari harga di pasar-pasar. Bagi pemilik industri tenun yang tidak punya modal diberikan pelayanan sistem barter. Mereka diberikan bahan kemudian mengembalikan dalam bentuk hasil-hasil produksi tenun. Pemerintah dalam usaha menggiatkan pertumbuhan industri tenun untuk memenuhi kebutuhan sandang adalah dengan mewajibkan aparatnya menggunakan kain lurik³⁰. Para pemilik tenun membuat tenunan lurik untuk memenuhi kebutuhan jatah kain lurik aparat pemerintah sebagai salah satu pasar yang distimulasi pemerintah. Koperasi selain mendistribusikan bahan-bahan mentah juga menjadi penampung produk hasil dari tenunan masyarakat. Bahan benang itu diambil dari pabrik seperti di Secang, atau Cilacap tetapi juga ada yang diimpor dari Jepang dan Cina³¹. Cukup masuk akal, bahwa setelah nasionalisasi perusahaan Belanda dan pengusiran orang-orang Belanda, Soekarno selanjutnya lebih banyak menjalin hubungan dengan Jepang terkait

³⁰ ATBM pada waktu itu mampu menghasilkan jenis kain lurik tiga dimensi yang mutunya cukup bagus dan biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat *sruwal* (celana).

³¹ Abdul Rozak seorang pelatih tenun di Perusahaan tenun milih Ardja Sopir, daerah Minggir, wawancara tanggal 30 Mei 2004.

dengan pemberian dana pampasan perang (dana rehabilitasi) dan kemudian Juga Cina (Poros Peking), setelah Amerika pada tahun-tahun pertengahan 1950-an banyak membekingi pemberontakan-pemberontakan wilayah Sumatra dan Sulawesi³².

Di Wilayah Gamplong, Moyudan ada 42 pengusaha kecil, rata-rata kepemilikan alat antara 5-15 buah yang paling banyak 50 buah. Yang bergabung dengan Koperasi Dwijaya, meliputi wilayah Gampong, Sumber sari dan Argosari, Sedayu bantul. Seluruhnya kurang lebih berjumlah 160 pengusaha kecil. Karena banyaknya anggota perkembangan koperasi cukup maju, bahkan sampai memiliki sebuah truk sebagai alat transportasi untuk mencari bahan mentah atau mendistribusikan jatah benang dari pemerintah. Kemajuan yang terjadi di Wilayah Moyudan yang pesat karena masyarakat telah punya pengalaman sebagai tukang tenun dari perusahaan-perusahaan tenun di Kota sejak zaman kolonial. Dengan berkembangnya tenun di wilayah pedesaan perusahaan tenun di kota Yogyakarta mengalami penurunan.

Di Yogyakarta barat, pengusaha tenun yang sangat maju waktu itu sampai bisa mempunyai sekitar 250 tenun dan mampu menampung pekerja sampai 350 orang. Perusahaan tenun itu milik Pak Ardja Sopir di daerah Sendangmulyo, Minggir. Perusahaan tenun ini membuat banyak model seperti stagen, serbet, dan bahan kain mori. Pemasaran hasilnya sampai ke berbagai daerah di Jawa, seperti Pekalongan, Purworejo, Purwokerto, Surakarta dan Jakarta.

Para pengusaha sekitar Minggir dan Moyudan sebelah utara membentuk koperasi Panca Djaja yang berpusat di Sumber agung Ngijon sekitar 3,5 Km dari lokasi koperasi Dwi Djaja di Sumber Rahayu, Moyudan. Tidak jauh dari Moyudan, terdapat juga satu koperasi tenun lagi, yaitu koperasi Tjatur Djaja di Nanggulan, Kulon Progo yang wilayahnya dibatasi oleh Sungai besar Progo yang mengalir sampai ke Samudra Hindia. Lokasi sentra industri tenun lokal

³² Lih. Audrey R and Goerge McT. Kahin, *Subversion as Foreign Policy. The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia*. New York, 1995 bdk Masashi Nishihara, *The Japanese and Soekarno's Indonesia. Tokyo-Jakarta Relation, 1951-1966*. Univ Press of Hawaii Honolulu, 1976.

yang berdekatan itu memang ada hubungannya dengan jaringan pemasaran dan bahan baku. Di Moyudan ada pasar tradisional yang sejak dulu terkenal sebagai pusat jual-beli lawe dan produksi tenun lokal berupa stagen, pasar itu dikenal dengan Pasar Ngijon. Sementara di Kulon progo juga ada pasar tradisional yang kurang lebih sama, yakni pasar Kenteng, di Nanggulan. Pasar-pasar itu muncul sejak zaman kolonial Belanda. Tentang perkembangan pasar dan hubungannya dengan perkembangan ekonomi Jawa yang banyak dilakukan oleh perempuan bisa dilihat dalam kajian Ann Stoler tentang dalam otonomi wanita Jawa dan perkembangan pasar tradisional³³. Kajian Ann Stoller diperkuat oleh penelitian Kodiran tentang peran sosial dan ekonomi wanita pengrajin tenun Stagen di Kulon Progo. Perempuan dalam keluarga Jawa banyak menjadi tulang punggung ekonomi keluarga lewat usaha perdagangan atau produksi kerajinan. Kebanyakan buruh tenun pada waktu itu adalah kaum perempuan.

Menurut penuturan bekas ketua Koptexi Pusat DIY, bapak Poerwo Susanto³⁴, seorang lulusan MULO, yang lahir tahun 1917, dengan berkembangnya tenun industri tenun ATBM di pedesaan Yogyakarta, khususnya di wilayah Moyudan masyarakat mengalami suatu peningkatan kesejahteraan yang cukup tajam. Sebelum ATBM kebanyakan masyarakat masih menggunakan tenun Gendong untuk menghasilkan kain lurik, setelah berkembang industri tenun ATBM meningkatkan volume produksi dan mampu mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Koperasi tekstil Indonesia dikembangkan untuk menumbuhkan industri kecil di tingkat masyarakat, tidak hanya para pemilik modal. Kemajuan yang dicapai oleh masyarakat, para pemilik industri kecil, membuktikan bahwa akses dan kesempatan membuat mereka bisa meningkatkan usaha kewirausahaan di bidang tenun, di luar

³³ Ann Stoler mendapat fakta bahwa perempuan di daerah Kulon Progo memiliki kemandirian karena mereka berhasil menjadi tulang punggung keluarga, sebagai pencari sekaligus pengatur uang. Dalam struktur sosial di Jawa wanita pada masa lalu menempati kelas dua, dan dalam sistem warisan tidak punya hak atau hanya mendapatkan sebagian kecil dari kaum pria.

³⁴ bekas Ketua Koptexi Pusat “Bhineka Tunggal Djaja” DIY yang menjadi perintis berkembangnya koperasi-koperasi primer di wilayah pedesaan Yogyakarta, wawancara tanggal 14 Agustus 2004

pertanian. Dalam arti tertentu, dapat dikatakan bahwa para pemilik industri tenun di wilayah moyudan mendapatkan satu identitas ekonomi sebagai kelompok wirausaha yang cukup berhasil pada masanya.

4. Kemunduran Industri Tenun Lokal

Pesatnya perkembangan tenun lokal waktu itu terkait erat dengan kebijakan pemerintah dalam rangka nasionalisasi. Kebijakan proteksi terhadap pengadaan benang dari pemerintah dan memberikan peluang bagi perkembangan industri tenun lokal. Dilarangnya kelompok Cina untuk berdagang sampai di tingkat kecamatan juga merupakan kondisi bagi peningkatan perkembangan industri tenun lokal secara cepat. Namun kondisi itu tidak lama, karena pergantian pemerintahan Soekarno, kebijakan untuk pengembangan industri kecil tidak ada, kebijakan ekonomi kembali menjadi perekonomian bebas. Sehingga masyarakat kecil yang kurang modal, tidak mampu bertahan menghadapi kompetisi dari perusahaan-perusahaan besar. Selain itu, pada waktu itu para pengurus Koptexi menurut penuturan Pak Poerwa, sebagian besar adalah anggota PPDI³⁵ yang dikategorikan oleh pemerintah menjadi organisasi simpatisan PKI. Sehingga banyak yang ditahan, termasuk dirinya. Karena tidak terbukti kemudian dibebaskan kembali. Selanjutnya kepengurusan Koperasi menjadi semakin turun, akhirnya bubar. Asetnya dilelang dan dibagi-bagikan kepada anggota, meski ada anjuran agar kekayaan koperasi perlu diselamatkan.

Sulitnya pasokan bahan baku membuat pengusaha industri tenun lokal yang kekurangan modal gulung tikar. Pemilik usaha tenun yang bertahan adalah mereka yang memiliki modal cukup, mampu mempertahankan kualitas, dan kreatif menciptakan terobosan model-model baru. Beberapa diantaranya adalah usaha tenun milik ibu Dirja, Adimulyo dan beberapa yang memang mempunyai

³⁵ PPDI adalah Persatuan Pamong Desa Indonesia yang di beberapa tempat simpati pada PKI, untuk di Yogyakarta tidak berafiliasi pada PKI. Ketika banyak anggota PPDI ditahan, Sri Sultan HB IX memerintahkan untuk mengeluarkan mereka dari tahanan. Pak Poerwo Susanto adalah satu yang ditahan dan dibebaskan setelah diinterogasi oleh aparat. Karena keterlibatannya dalam PPDI, Pak Poerwa diberhentikan dari semua jabatan, sebagai kepala desa dan ketua koptexi Bhineka Tunggal Djaja, DIY.

ketekunan dan pengalaman dagang sehingga bisa mengelola usahanya sampai sekarang³⁶.

Kemunduran usaha mereka juga tidak terlepas dari perkembangan zaman ketika pemerintah Orde Baru lebih mengutamakan kesempatan bagi pengembangan industri tenun mesin dan masuknya para investor asing ke Indonesia secara besar-besaran, juga persaingan ketat dengan produksi import yang lebih murah harganya. Selain itu juga karena adanya perubahan cara berpakaian orang Indonesia yang sudah mengalami “pembabatan”. Orang lebih suka memakai celana panjang dan blus, bukan lagi sarung atau sinjang. Orang yang masih memakai pakaian itu adalah kaum perempuan masa lalu yang jumlahnya semakin menyusut, banyak diantaranya juga berganti dengan gaya berpakaian barat. Pakaian gaya tradisi semakin terbatas penggunaannya, selain kaum perempuan yang tua, juga pada saat-saat ada hajatan atau upacara tradisional yang secara adat harus menggunakan pakaian tradisi.

E. Indonesianisasi : Berkah atau Petaka

Tentu pengalaman menikmati kemajuan -industri tenun (off-farm) yang ternyata bisa diandalkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada waktu itu, merupakan sebuah berkah tersendiri - terlepas dari kerumitan politik di tingkat pemerintahan Indonesia. Satu pengalaman sederhana yang mungkin tidak punya arti jika dibandingkan dengan angka-angka statistik modern yang biasa menjadi ukuran kemajuan sebuah industri besar terlebih dari kaca mata pengalaman Barat yang sudah mengalami revolusi industri. Sesungguhnya, pengalaman kecil dengan perkembangan industri sederhana ini bisa menjadi awal suatu proses industri besar yang potensial dari masyarakat jika mendapatkan dukungan modal dan perbaikan sistem manajemen usaha mereka.

³⁶ Di wilayah Gamplong dan Sumber sari sekarang ini muncul kreasi pengembangan industri kerajinan dengan memanfaatkan mesin tenun ATBM, mereka membuat produk-produk baru berupa tas, topi dan berbagai macam dari bahan enceng gondok, pandan dan mendong. Beberapa diantaranya adalah bekas tenun yang masih bertahan hingga kini, bisa dikatakan sekarang ini mereka juga sedang mengalami booming seperti tahun 1960-an hanya pelakunya sekarang terbatas -terutama yang memiliki modal besar.

Indonesianisasi dalam kasus pertumbuhan industri di Moyudan dapat dipahami sebagai proses panjang yang memiliki akar historis sejak zaman kolonial, bukan sebagai suatu pengalaman instan yang lahir dari proses pengambilalihan property milik perusahaan asing. Pergulatan Pak Ahmadi dan teman-tamannya sejak mulai menjadi buruh sampai berpikir menjadi pengusaha kecil merupakan satu bentuk semangat *enterpreneuership (kewirausahaan)* daripada tetap bertahan sebagai buruh di suatu perusahaan besar. Ada satu perubahan paradigma berpikir masyarakat di wilayah Moyudan bahwa berusaha membangun bisnis sendiri mampu memberikan kemajuan kehidupan masyarakat disamping usaha yang selama ini ditekuni, di bidang pertanian. Jiwa kewirausahaan itu ditanamkan oleh orangtua yang berprofesi sebagai pedagang seperti yang dialami oleh ibu Wardi, seorang pengusaha industri tenun yang sampai saat ini tetap bertahan, warga desa Sangubanyu, Moyudan. Profesi lain seperti menjadi guru dan aparat pemerintah waktu itu penghasilannya tidak cukup untuk hidup. Profesi sebagai pedagang atau pengusaha tenun menjadi lebih disukai. Pengalaman yang sama juga dialami oleh Pak Ardja Tulus³⁷ dan Pak Ahmadi, setelah menekuni industri tenun, kehidupan mereka meningkat, mereka mampu menyekolahkan anak hingga tingkat SMA ke atas dan mampu meningkatkan pendapatan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Indonesianisasi bagi masyarakat kecil yang diberikan kesempatan untuk mengembangkan industri kecil, di luar pertanian, memberikan keyakinan bahwa mereka sesungguhnya punya kemampuan untuk mengembangkan usaha secara baik, terutama bagi pengusaha pengusaha yang memiliki ketrampilan tenun dan kemampuan manajemen usaha. Seleksi alam terjadi ketika para pengrajin tenun tidak mampu menjaga kualitas dan kurangnya daya inovasi mode yang memenuhi selera konsumen.

³⁷ Pak Ardjosukarto (lebih dikenal dengan Ardja Tulus) adalah seorang bekas pengurus koperasi Dwijaya bagian distribusi. Bersama istrinya bernama wagiyah mengembangkan industri tenun di Gamplong. Pak Ardja memiliki 36 mesin ATBM.

Industri tenun rakyat bisa berkembang cepat seperti yang terjadi di beberapa sentra Industri tenun Indonesia, seperti di Moyudan dan beberapa kota yang sudah maju sejak zaman kolonial seperti Majalaya di Jawa Barat, juga negara-negara berkembang lain karena tenun merupakan industri yang sederhana dan mudah ditransfer kepada masyarakat luas, selain itu juga merupakan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, sektor industri tenun menjadi ujung tombak dari proses industrialisasi di suatu negara baru lepas dari cengkeraman kolonial. Di Indonesia sendiri Industri tenun sesungguhnya telah ada sejak abad ke XVII. Dengan menggunakan bahan serat, terutama kapas, para pengrajin masa lalu menenun kain-kain keperluan mereka³⁸.

Indonesianisasi menjadi petaka ketika tidak ada suatu konsistensi kebijakan pemerintah untuk mengembangkan secara serius semangat atau jiwa enterprenuer masyarakat. Kesenjangan modal dan ketrampilan dengan komunitas-komunitas lain (komunitas Cina, dan asing lain) dengan pribumi berakar dari sejarah panjang struktur sosial masyarakat yang diskriminatif sejak zaman kolonial. Indonesianisasi yang terjadi pada waktu itu yang mendorong kuat kelompok pribumi untuk berkembang dengan pemberian lisensi khusus, dan subsidi dari pemerintah, bahkan tindakan pengambilalihan, sesungguhnya merupakan gerakan "bisa dipahami" sebagai negara yang berdaulat. Karena kesulitan-kesulitan nyata dan kerumitan politik, indonesianisasi dipandang dari sisi kaca mata para pengamat dan peneliti ekonomi liberal, dimana hukum pasar yang akan menentukan keberhasilan sebuah usaha, industrialisasi yang dipacu dengan banyak subsidi dan privelege bagi pengusaha pribumi dikatakan mengalami kegagalan. Pengusaha pribumi yang dapat fasilitas seperti Dasaad, Rahman Tamin, H.A. Gani Azis, Kusmulyono, Nahar Zahiruddin, dan Wahab Affan, semua telah hilang dari peredaran dan kalah dengan pengusaha non-pri.³⁹ Kondisi ini adalah petaka tersendiri, karena kenyataan dalam rimba kompetisi

³⁸ Frans Seda, *Pertekstilan Nasional Indonesia, Perkembangan, Kondisi dan Prospeknya*, Prisma 5, 1985.

³⁹ Richar Robinson, *Kesenjangan Antara Modal Golongan Ekonomi Kuat dan Lemah di Indonesia*, Prisma 5, 1985.

yang menang adalah mereka yang punya modal kuat, organisasi rapi, ketrampilan dan manajemen yang efisien. Sementara kaum pribumi yang seumur-umur berkubang dalam “situasi ketertindasan dan dominasi” pihak lain dan kesempatan untuk berkembang dibatasi, ketika harus bersaing sudah bisa dipastikan akan mengalami kegagalan. Yang perlu diperhatikan juga dalam studi soal indonesianisasi ini adalah cara pikir mana yang dipakai, ketika kerangka yang dipakai tetap (kolonial) maka indonesianisasi tetap tidak punya makna penting, selain sebuah repetisi sifat-sifat yang diwariskan oleh kolonial itu sendiri.

Indonesianisasi yang wajar dan mampu menumbuhkan identitas ekonomi pribumi bisa dilihat dari perkembangan historis serpihan-serpihan pengalaman kecil yang membangun keyakinan dan mempupuk mental berusaha tanpa adanya pembedaan atau pilih kasih, sebagai mana terjadi dalam pengalaman-pengalaman masyarakat industri tenun lokal mengalami kemajuan usahannya. Proses yang dialami oleh pengusaha industri tekstil masa lalu itu patut dipertimbangkan disamping pertimbangan kapital semata. Mentalitas dan spirit enterprenuership itu menjadi penting bagi proses indonesianisasi yang alamiah.

F. Penutup

Kebijakan Indonesianisasi yang digerakan oleh struktur politik makro di tingkat nasional untuk mengembangkan peranan pribumi dalam pengambilalihan tehnologi dan modal untuk pengembangan enterprenuership kelompok pribumi antara tahun 1950-1960-an di jaman pemerintahan Sukarno dalam kasus industri tenun di pedesaan Yogyakarta didapatkan data-data yang menguatkan bahwa pengembangan industri sederhana yang didukung oleh kebijakan “berdikari” membuat masyarakat banyak mengembangkan usaha-usaha ekonomi non pertanian sebagai penunjang hidup keseharian. Secara

hitoris para pemilik tenun lokal memiliki dasar sebagai para pedagang kecil atau pedagang pasar, pengalaman manajemen di tingkat paling sederhana dalam mengembangkan usahanya. Terbentuk juga organisasi-organisasi ekonomi masyarakat dan jaringan-jaringan pasar lokal terhadap produk-produk industri tenun rakyat yang berkembang di Yogyakarta. Proses Indonesianisasi dalam kasus yang sangat mikro ini terjadi secara lebih natural sesuai dengan kemampuan masyarakat dalam menangkap gerak perkembangan situasi pasar dan kecenderungan perubahan masyarakat modern. Sesungguhnya, tidak adil kesimpulan-kesimpulan yang cenderung mengatakan bahwa pribumi tidak punya kemampuan dalam mengembangkan sense of business karena kekuarangan modal dan skill seperti yang seringkali menjadi perbincangan para ahli dari kacamata ekonomi liberal yang mensyaratkan fondasi-fondasi tertentu yang belum dimiliki oleh para pengusaha Indonesia. Sebagai refleksi menarik kutipan kata-kata Edgar du Perron oleh Van Der Kroepf berikut; *“The Struggle for the human dignity of the Javanese, one should not forget, is also the struggle for the human dignity of the colonizing Netherland.”*⁴⁰

Referensi

Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: Grasindo, 1993.

Ann Stoler, *Struktur Kelas dan Otonomi Wanita di Pedesaan Jawa* dalam Koencaraningrat (ed.) *Masalah-masalah Pembangunan*. Jakarta : LP3ES, 1982.

Audrey R. & George McT. Kahin, *Subversion as Foreign Policy. The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia*, NY, 1995.

⁴⁰ J.M. Van der Kroef, *Indonesia in the Modern World*, Masa Baru, Bandung, 1954, hal 1.

Masahi Nishihara, *The Japanese and Sukarno's Indonesia*, Monographs of the Center for Southeast Asian Studies Kyoto University, An East- West Center Book, The University Press of Hawaii, Honolulu, 1976.

J.M. Van der Kroef, *Indonesia in the Modern World*, Masa Baru, Bandung, 1954.

John O'Sutter, *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy 1940 -1955*, South East Asia Program Departement of Far Eastern Studies, Cornell University, Ithaca, NY, 1959.

Frank H Golay et all, *Underdevelopment and Economic Nationalism in Southeast Asia*, Cornell Univ. Press, Ithaca and London, 1968.

Frans Seda, *Pertekstilan Nasional Indonesia, Perkembangan, Kondisi dan Prospeknya*, Prisma 5, 1985.

Kodiran, *Peranan Sosial Dan Ekonomi Wanita Perajin Tenun Setagen Di Kulonprogo*, D.I. Yogyakarta, Fakultas Sastra UGM Yogyakarta, 1993/1994.

Mangunwijaya, YB., *Menuju Republik Indonesia Serikat*, Gramedia, 1998.

Peter Boomgard, *Anak Jajahan Belanda Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*, Jakarta: KITLV dan PT Djambatan, 2004, hal. 64.

Richard Robinson, *Kesenjangan Antara Modal Golongan Ekonomi Kuat dan Lemah di Indonesia*, Prisma 5, 1985.

Takhasi Siraishi, *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912 -1926*, Jakarta: Grafiti Press, 1997, hal 10-11 bdk *Koloniale Verslag, 1876,1881, 1896*.

Thomas Lindblad, *The Importance of Indonesianisasi During The Transition From The 1930s to The 1960s*, Amsterdam, 2002.

Multatuli, *Marx Havelaar Atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda*, Pt. Djambatan, Jakarta, 1972.

William Joseph O'Malley, *Indonesia in the Great Depression. A Study of East Sumatra and Yogyakarta in the 1930's*, Cornell Univ. NY, 1977 ditulis kembali oleh Nirwono dalam Prisma 8, Agustus 1983.

Focus Kita, Mei 2004

Kilas Balik PPPI cf. *Economic Weekblad*, 8 February 1939.

Majalah Ekonomi Kepatihan Yogyakarta, April 1951.

Wawancara :

Abdul Rozak, tanggal 30 Mei 2004

Ardjo uwuh, tanggal 30 Mei 2004

Adimulyo, tanggal 6 Juni 2004

Ibu Adimulyo, tanggal 13 Juni 2004

Ibu Sabar, tanggal 20 Juni 2004

Ardja Tulus, tanggal 8 Agustus 2004

Ahmadi, tanggal 9 Agustus 2004

Poerwo Susanto, tanggal 14 Agustus 2004

Ibu Wardi, tgl 14 Agustus 2004